

**LAPORAN GUBERNUR BANK INDONESIA
RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2017**

*“Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan Melalui Penguatan Infrastruktur
Dan Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Kesejahteraan Rakyat”*

Jakarta, 27 Juli 2017

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia

Yth. Para Menteri Kabinet Kerja

Yth. Kepala Lembaga Negara

Yth. Para Gubernur Provinsi

Yth. Para Walikota/Bupati

dan Undangan yang berbahagia

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Pembukaan dan Pentingnya Rakornas Pengendalian Inflasi 2017

[slide 1]

- 1) **Pertama-tama kami haturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir untuk membuka dan memimpin langsung acara pagi ini.** Kehadiran Bapak Presiden menunjukkan konsistensi komitmen Pemerintah serta mempertegas pentingnya sinergi kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil.
- 2) **Rakornas kali ini akan mengangkat tema “Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Kesejahteraan Rakyat”.** Tema ini selaras dengan agenda kita untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada akhirnya tentu akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi.

[slide 2]

- 3) Dalam kesempatan ini, ada 3 (tiga) hal yang ingin kami laporkan kepada Bapak Presiden, **pertama:** evaluasi pencapaian inflasi nasional dan perkembangan TPID; **kedua:** tindak lanjut yang telah dilakukan pasca arahan bapak Presiden di Rakornas tahun lalu; dan **ketiga:** prakiraan inflasi 2017, serta upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil.

Evaluasi Inflasi Nasional 2016 dan Perkembangan Inflasi Juni 2017

Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati,

[slide 3]

- 4) Kita patut berbesar hati karena pada tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2017, inflasi tercatat cukup rendah dan terkendali. **Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2016 tercatat pada level 3,02%, terendah sejak 2010.**
- 5) Inflasi 2016 yang rendah juga terjadi cukup merata di berbagai daerah. Angka inflasi tahunan di berbagai daerah tercatat rendah seperti di Jawa sebesar 2,59%, Kalimantan 3,40%, dan Sumatera 4,53%. Di Kawasan Timur Indonesia, inflasi juga tercatat cukup rendah, di Sulawesi 2,27%, Bali-Nusa Tenggara 2,93%, dan Maluku-Papua 3,07%.

[slide 4]

Inflasi yang terkendali juga masih berlanjut sampai dengan pertengahan 2017. **Hingga bulan Juni 2017, inflasi IHK nasional baru mencapai 2,38% (year to date).**

- 6) Bahkan, secara khusus kami laporkan, **inflasi IHK pada periode puasa dan lebaran di bulan Juni 2017 merupakan inflasi terendah untuk periode lebaran selama 6 tahun terakhir.**

[slide 5-6]

- 7) **Kami sangat mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang saat ini jumlahnya telah mencapai 524 (34 provinsi dan 490 kabupaten/kota), terutama dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi kepada masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan 4K.**

Tindak Lanjut Arahan Presiden

Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati,

- 8) Kinerja pengendalian inflasi yang positif tentu tidak lepas dari arahan dan dukungan Bapak Presiden. **Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden,** Tim Pengendalian Inflasi di tingkat pusat dan daerah juga telah melakukan berbagai inovasi program guna mendukung pengendalian inflasi nasional.

[slide 7]

- 9) **Pertama**, memperkuat dasar hukum dan menyederhanakan kegiatan koordinasi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi.

[slide 8]

- 10) **Kedua**, memperkuat sinergi perencanaan program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah dengan sasaran pencapaian inflasi nasional. Sinergi ini diatur dalam Permendagri No. 33 tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018;

[slide 9]

- 11) **Ketiga**, mengembangkan sistem informasi dan koordinasi pengendalian harga pangan berskala nasional, melalui **Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional**. Program kerja ini merupakan kerja sama Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri.
- 12) Sebagai informasi Bapak Presiden dan hadirin, data PIHPS Nasional difokuskan **pada 10 komoditi pangan dengan 21 varian penyumbang utama inflasi volatile food**. Data dikumpulkan dari proses survei langsung di **164 pasar tradisional, dari 82 kota sampel inflasi IHK di 34 provinsi**.

[slide 10-11]

- 13) **Keempat**, berbagai inovasi program telah dilakukan oleh TPID di banyak daerah. Inovasi tersebut antara lain berupa upaya **mendorong efisiensi tata niaga pangan** melalui kerja sama perdagangan antar daerah baik bersama Bulog maupun dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya juga dilakukan dengan memperbaiki **infrastruktur pedesaan dan pemberian insentif lahan pertanian**.

Prakiraan Inflasi 2017, dan Upaya yang perlu dilakukan

Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia,

[slide 12]

- 14) **Ke depan, konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu diteruskan**. Pada 2017, inflasi diperkirakan akan tetap berada pada sasaran inflasi 2017, yaitu $4,0 \pm 1\%$.
- 15) Pada 2018 nanti, sasaran inflasi telah ditetapkan lebih rendah yakni sebesar $3,5\% \pm 1\%$. Hal ini tentunya kami sambut baik, dan sekaligus menjadi tantangan kita bersama **untuk mensejajarkan bangsa kita dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara**.
- 16) Terkait hal tersebut, kami mencatat **beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama**.

[slide 13]

- 17) **Pertama;** melanjutkan dan mempercepat **pembangunan infrastruktur nasional** yang saat ini telah menjadi fokus utama agenda kerja Pemerintah.
- 18) **Kedua;** menjaga ketersediaan pasokan pangan, antara lain melalui pengaturan produksi dan penguatan kelembagaan.
- 19) **Ketiga;** mempercepat pembenahan efisiensi tata niaga komoditi pangan.
- 20) **Keempat;** terus memperkuat pengembangan PIHPS **sebagai sistem informasi pangan di era digital ekonomi** agar ketimpangan informasi harga pangan yang berisiko meningkatkan ekspektasi inflasi yang berlebihan dapat dikurangi.
- 21) **Kelima; mencermati** ketepatan penentuan waktu penetapan harga **energi domestik** agar dampak lanjutan kepada inflasi barang dan jasa lainnya dapat diminimalkan.

Pengumuman Pemenang TPID dan Penutup

Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati,

[slide 14]

- 22) Sebelum kami mengakhiri laporan, sebagaimana tahun lalu dalam forum ini, **Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID akan kembali memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki TPID berkinerja terbaik**, baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
- 23) Penghargaan dibagi ke dalam beberapa kategori yakni: **TPID Baru Berprestasi**, yaitu penghargaan bagi TPID yang baru dibentuk tahun 2015 tetapi sudah menunjukkan prestasi yang baik, **TPID Inovatif** tingkat kabupaten/kota dan provinsi, **TPID Berprestasi** untuk tingkat kabupaten/kota yang bukan merupakan sampel inflasi IHK, dan yang terakhir adalah **TPID Terbaik** untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
- 24) Proses penilaian dan penetapan pemenang penghargaan dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri atas anggota Pokjanas TPID dan **beberapa pakar dari kalangan akademisi** yang selama ini memang aktif mengamati perkembangan aktivitas TPID di daerah.
- 25) Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan kepada pemenang TPID *Award* untuk kategori TPID Berprestasi dan TPID Terbaik.

Demikian laporan kami.

Atas perhatian Bapak Presiden dan para hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wa Barakatuh.

Jakarta, 27 Juli 2017

Agus D.W. Martowardojo
Gubernur Bank Indonesia